Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abdul, Rasyid Thalib, S.H., M.Hum. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesi*, Citra aditya Bakti, Bandung; 2006.

Aburaera, Sukarno *et. al*, *Filsafat Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Kencana, 2013.

Al-Bukhori Al-Ja'fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhori*, Makatabah Syamilah, Hadits Nomor 6622.

Amiruddin, *et. al.Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet 13, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta; Grafika, 2011.

_____ *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

_____ *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, tt.

_____ *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, tt

_____ *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2005

_____ *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta; 2005.

_____ dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kalsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI; Jakarta, 2006.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Rekam Jejak Para Khalifah*, Pen; Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Ar-Rahman, 2013.

Budiardjo, Miriam.*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecth) yang dimiliki Hakim Dalam System Hokum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta; 2005.

Fockema Andrea, Mr. N.E Algra Cs, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Binacipta, 1977.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, 2013.

Hady, Nurudy. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945*, Malang, Setara Press, 2010.

Hadjon, Philipus M., et. al, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara (Cetakan 10)*,Jogjakarta; UGM Pers, 2008.

Hamdan Zoelfa, Mahkama Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia, dalam *"Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam"*, Hamdan Zoelva, et al, Jakarta; Kencana, 2012.

_____ *Impeachment Presiden; Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Preiden Menurut UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2005.

HAS. Natabaya, S.H., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Jakarta, 2006.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Gia Indonesia, 2002.

Hans Kalsen alih Bahasa oleh Somardi, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Bandung, 1995.

Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945 "Antara Mitos dan Pembongkaran"*, Jakarta, Mizan 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jenedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurirudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress; Jakarta, 2103.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Mahfudz, Moh MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Raja Persada Grafindo, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____ *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; Rajawali Pers, 2008.

Maria Farida Indrati, dalam *Demokrasi Lokal; Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Dalam *Sengketa Pemilukada, Putusan MK, dan Pelaksanaan Putusan MK*. Konpress; Jakarta, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pustaka Kencana, 2010.

Mustafa Luthfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press; Jogjakarta, 2010.

Muchamad Ali Syafa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Mawardi-Al, Imam, *Al-Akhkam As-Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah*, Bayrut: Daar el Kitab Al-Araby, tt.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 1997.

_____, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika; Jakarta, 2008.

Ni'matul, Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Nurudy, Hady, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.

Salim, Abdul Mun'im, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1994.

Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____ *Sosiologi Hukum dalam Masayarakat* Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001.

Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, Bandung; Bina Cipta, 1987.

Suharizal, *Pemilukada; Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni; Bandung, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Taimiyah, Ibnu, *Siyaasah Syar'iyah: Etika Politik Islam,* Ter: Rofi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu* (Praktik Kajian Pemilu 2004), Perludem; Jakarta; 2014.

Triwulan Tutik, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*, Jakarta, Cerdas Pustaka, 2008.

Victorianus M.H. Randa Puang, Filsafat Hukum, Medan; Sof Media, 2013.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236C.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkama Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No 3 tahun 2009 Perubahan kedua atas undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangnga Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan-Peraturan Lainnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Surat Edaran MA Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2008, *Menegakkan Keadilan Substansif*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Jakarta, 2008).

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Ketiga*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Latar Belakang-Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku 5*, tentang Lembaga Pemusyawaratan Perwakilan, 2010).

Putusan dan Risalah Persidangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/ 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risalah Sidang III (Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR), Perkara Nomor 97/PUU-XII/2013.

Risalah Sidang IV (Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah), Perkara Nomor 97/PUU-XII/2013.

Makalah dan Penelitian

Iwan Satriawan dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012).

Widodo Ekatjahjana, Judul Makalah "Masalah dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada yang Jujur, Adil, Demokratis, dan Konstitusionil di Indonesia", disampaikan dalam kegiatan Simposium Nasional: Masalah dan Tantangan Menghadapi pemilukada, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden 2014, Jember, 16-17 Maret 2012.

Arief Wibowo, Makalah "Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, (Disampaikan dalam Seminar Nasional "Fromat Ideal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat), di Universitas Jember, 25 April 2015.

Hakim Supandi, Hakim Agung RI, Makalah ini di paparkan dalam rangka seminar Nasional di Fakultas Hukum, Universitas Jember. Adapun tema makalah ini adalah "Peran Mahkamah Agung dalm Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia, di Universitas Jember, 25 April 2015.

Wawancara dan Seminar

Nuzulul Qur'an, Anggota Tim Peneliti dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi, 15 Juni 2015.

Dr. Yosanna Laoly, Menteri Hukum dan HAM. *Keynote Speaker* dalam Seminar Nasional "Format Ideal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat", di Universitas Jember, Jember, 25 April 2015.

Prof. Arif Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Format Ideal Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka Menegakkan Kedaulatan Rakyat", di Universitas Jember, Jember, 25 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1, diakses pada Tanggal 11 Mei 2015,
http://202.153.129.35/berita/baca/lt4bc2f97be9525/pengadilan-khusus-pemilu-demi terwujudnya-ielectoral-justicei diunduh 12 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id